

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam hal ini Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 24 tahun 2005, 2005) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan untuk satu periode pelaporan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang dikehendaki, adapun karakteristik kualitas

laporan keuangan yang perlu diwujudkan dalam memenuhi tujuannya yaitu Dapat dimengerti, *relevance, materiality, reliability, faithful representation, substance over form, neutrality, proudence, completeness*, dan *Comparability*.

Rahman (2012) menyatakan : “Sistem Akuntansi Instansi merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, dan setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan laporan keuangan”.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan catatan atas Laporan keuangan. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari dua sub bagian, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara dituntut dapat memberikan pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh staf keuangan dalam Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan dukungan terhadap penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di tingkat Satker Randal PIP SU yang akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijelaskan di atas selama ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kendala dalam penggunaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyajian laporan keuangan. Adapun kendala-kendala yang terjadi adalah keterlambatan dalam proses pembuatan, penyampaian laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN. Hal ini disebabkan karena informasi dan data yang kurang akurat, selain itu juga sering terjadi kesalahan pengimputan data, serta masalah pada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah administrator yang masih kurang memahami dan kurang menguasai aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) karena tidak berlatar belakang akuntansi. Dengan adanya penerapan Sistem Akuntansi Instansi, maka dalam kualitas laporan keuangan diharapkan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akan membantu setiap permasalahan yang biasanya terjadi dan tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan maupun kesalahan dalam pengimputan data serta akan membantu mempermudah administrator yang tidak berlatar belakang akuntansi dalam memahami dan menguasai sistem akuntansi instansi pada saat mengoperasikannya. Hal ini dijelaskan dalam keputusan Menteri Keuangan RI No.476/KMK.01/1991 bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi keuangan dan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh lembaga tingkat manajemen pada pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan secara berkelanjutan terhadap sistem yang diterapkan. Bertolak dari kondisi riil

tersebut, maka sudah sewajarnya dan merupakan suatu keharusan bagi Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Sumatera Utara untuk memberikan solusi praktis atas kesenjangan tersebut berupa peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama para Pegawai Pengelolaan Keuangan dengan memberikan bimbingan teknis tentang Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) agar menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan salah satu *asset* penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan Sumber Daya Manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan Laporan Keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. (Warisno, 2008).

Upaya pemerintah di dalam memenuhi akuntabilitas publik ini dibuktikan dengan mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah, undang-undang serta instruksi presiden. Peraturan-peraturan yang terkait antara lain (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara., (4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (5) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan (6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara. PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No.08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan bagi entitas pelaporan dan pos-pos tertentu yang memerlukan perlakuan khusus diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh departemen/kementerian Negara/lembaga. Mereka melakukan pemrosesan data yang akan menghasilkan LRA dan neraca. Data akuntansi dan laporan keuangan tersebut secara berkala disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi di atasnya. Pada tingkat wilayah, data akuntansi tersebut selain disampaikan kepada unit akuntansi eselon I, juga wajib disampaikan kepada KAR setempat sebagai bahan rekonsiliasi data. Hasil rekonsiliasi KAR disampaikan ke BAKUN yaitu kepada pusat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (AKLAP) dan pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (AKBIA).

Mengingat pentingnya SAI dalam pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak terpisahkan dalam

penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan (disebut akuntabilitas) didalam mengelola keuangan, salah satunya pada pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh tingkat entitas terkecil yaitu tingkat satuan kerja (UAKPA), maka penulis melakukan penelitian di Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Satker Randal PIP-SU yang berada dibawah naungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara (Distarukim Prov.SU). Dimana Satker tersebut menggunakan anggaran dari pemerintah pusat yaitu APBN dalam melaksanakan pemantauan progress keuangan pada Satker-satker yang berada di Lingkungan Distarukim Provsu dan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa mengelola keuangan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi membantu kinerja satuan kerja, namun disisi lain beberapa kendala masih sering ditemukan. Mengingat bahwa adanya SDM yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, maka peneliti tertarik untuk meneliti apa saja yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: Riyanto (2007), Rahmi (2008), Oktaviana (2010) dan Abidin (2013); Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut penerapan sistem akuntansi instansi, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan sistem akuntansi instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, Menunjukkan bahawa penelitian ini menarik untuk diteliti kembali, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul sebagai berikut: **"Pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi akan lebih akuntabel?
2. Apakah latar belakang Sumber Daya Manusia berpengaruh dalam mengelola Sistem Akuntansi Instansi tersebut?
3. Apakah kendala-kendala mempunyai dampak yang buruk terhadap pengelolaan keuangan?
4. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mempunyai dampak yang besar terhadap pengelolaan keuangan?
5. Apakah petugas SAI mempunyai tanggung jawab dalam bentuk pelaporan setiap bulannya?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, dengan meneliti Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman yang menerapkan Sistem Akuntansi Instansi sebagai salah satu proses pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan pelaporannya dalam setiap bulan oleh Satuan Kerja tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Sumatera Utara.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi satker yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pemerintahan pada Satker Randal PIP Prov. SU.
2. Bagi instansi pemerintah yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam menggunakan Aplikasi SAI tersebut.
3. Bagi masyarakat atau publik, penelitian ini sebagai rujukan dalam meneliti lebih lanjut mengenai penerapan SAI.

THE
Character Building
UNIVERSITY